



## Berbasis Data Kemensos, Parameter KMS Diubah

UMBULHARJO (MERAPI) - Draf perubahan parameter Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta telah diajukan ke Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. Perubahan parameter KMS itu salah satunya mempertimbangkan parameter basis data terpadu (BDT) warga miskin Kementerian Sosial (Kemensos). Jika perubahan parameter itu disetujui walikota, maka pendataan KMS tahun 2019 menggunakan parameter baru.

"Konsep perubahan parameter sudah kami ajukan ke Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. Perubahan parameter ini akan disesuaikan dengan basis data terpadu pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Yogyakarta, Esti Setiarsi Senin (20/11).

BDT Kemensos RI itu selama ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan program perlindungan sosial misalnya Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nonn Tunai (BPNT). Penyesuaian parameter KMS dengan BDT Kemensos itu karena selama ini baru sebagian pemegang KMS yang menerima program perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Tapi dalam penyusunan parameter KMS juga mempertimbangkan kearifan lokal. Salah satu parameter yang diubah terkait besaran pendapatan minimal. "Baru separoh dari KMS yang menerima program bantuan kemiskinan dari pemerintah pusat," ujar Esti.

KMS yang merupakan kebijakan Pemkot

Yogyakarta mengampu warga fakir miskin, miskin dan rentan miskin. Sedangkan BDT Kemensos mengakomodir fakir miskin dan miskin. Kondisi itu membuat tidak semua pemegang KMS masuk dalam program perlindungan sosial pemerintah pusat. "Diupayakan ada basis data terpadu pusat dan daerah. Pusat menangani dan daerah juga bisa masuk memberikan perlindungan sosial," tambahnya.

Sementara untuk pendataan calon pemegang KMS tahun 2018 masih mengacu parameter dan indikator yang diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 244/KEP/2012. Dalam keputusannya itu ada 7 aspek penilaian dan 17 parameter KMS di antaranya pendapatan, tempat tinggal, kendaraan, pendidikan dan sosial.

Dia menuturkan tahapan pendataan KMS 2018 kini tahap rekapitulasi hasil uji publik tahap kedua yang mempertimbangkan masukan dari RT/RW. Sebagian data calon pemegang KMS 2018 ada yang dinilai tidak layak menerima, sehingga perlu verifikasi kembali. Setelah uji publik kedua sudah tidak ada peluang untuk menambah usulan baru pemegang KMS 2018. "Setelah rekap kami akan lakukan verifikasi cepat, dan lakukan olah data lagi. Targetnya akhir November selesai," ucap Esti.

Total ada 23.246 KK calon pemegang KMS tahun 2018 yang dilakukan uji publik tahap kedua. Jumlah itu meliputi 18.651 KK pemegang KMS 2017 dan usulan baru dari masyarakat sebanyak 4.595 KK.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005